

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan melalui penyelenggaraan otonomi daerah, sesungguhnya turut mempengaruhi sejumlah model kebijakan termasuk pada perencanaan pembangunan yang pada dasarnya sejumlah kewenangan kini lebih dititikberatkan pada daerah-daerah otonom. Dari beberapa regulasi yang berkenaan dengan otonomi dan desentralisasi dalam perencanaan pembangunan, pemerintah (pusat) kini lebih mengambil peran sebagai regulator yang bersifat indikatif serta mengarahkan keselarasan dalam aspek pembangunan antara daerah dengan prioritas nasional, selain kewenangan utama lain dalam beberapa aspek kebijakan lintas daerah yang dalam istilah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui sebagai urusan Konkuren, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Absolut.

Semangat otonomisasi melalui kebijakan dan program dengan sifat desentralis ini semakin memberi peluang bagi pemerintah daerah dalam berinovasi dari sisi kebijakan pemerintahan juga ruang interaksi yang terbuka bagi berbagai institusi dan kelembagaan serta masyarakat lokal dalam melahirkan beragam konsep-konsep perencanaan pembangunan yang mewadahi identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya lokal berorientasi pada pembangunan dalam skala lokal. Dalam hal ini pola kebijakan pembangunan ekonomi di daerah sepatutnya dapat mengoptimalisasi sektor-sektor ekonomi yang dianggap dapat memberi dampak ekonomi yang lebih besar dalam mendorong kemajuan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Kondisi Umum dokumen RPJP Nasional Tahun 2005-2025 (Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional 2005-2025, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 33), ada beberapa persoalan strategis yang masih menjadi beban dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah; kesenjangan pembangunan antar daerah (*regional disparity*); kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan (*urban-rural economic imbalances*); kesenjangan pendapatan perkapita (*income per capita inequality*); terdapatnya daerah-daerah miskin, tinggi

pengangguran, serta rendah produktivitas (*poor and low level of productivity's regions*); kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan (*rural-urban linkages*), dan; terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Mengacu pada data PDB sektor ekonomi nasional, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 masih sebesar 12,40% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,51% antara triwulan IV 2021 hingga triwulan IV 2022 (Yoy). Sebaliknya dari aspek penyerapan tenaga kerja, publikasi terakhir pada Februari 2022 (BPS; <https://www.bps.go.id/>), sektor utama Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 29,96% dari total tenaga kerja. Menurut pemberitaan Detiknews (<https://news.detik.com/>) beberapa waktu sebelumnya, menyebutkan bahwa sektor pertanian menjadi satu-satunya dari lima penyangga utama PDB yang tumbuh positif dimasa pandemi sepanjang tahun 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,19% yang didalamnya termasuk sub-sektor perkebunan dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 0,17%. Data yang disampaikan setidaknya memberi gambaran bahwa sektor pertanian bagaimanapun masih memiliki peranan sentral dalam perekonomian nasional terutama dalam kontribusinya membangun ekonomi perdesaan sebagai wilayah dengan beban penduduk miskin terbesar di Indonesia, yang menurut data BPS (<https://www.bps.go.id/>) Tahun 2021 masih sebesar 12,53% dibanding tingkat kemiskinan perkotaan yang hanya sebesar 7,60%.

Pandangan *urban bias* yang menjadi kecenderungan umum dan banyak mempengaruhi muatan perencanaan pembangunan dalam beberapa dekade terakhir, telah mengabaikan potensi desa untuk didorong berkembang dengan massifnya pemenuhan infrastruktur dan suprastruktur perkotaan, sebaliknya kebijakan yang sama sangat minim dilaksanakan pada perdesaan. Dengan angka kemiskinan yang terbilang besar di perdesaan serta kontribusi sektor pertanian yang masih tinggi dalam struktur perekonomian nasional dibarengi dengan tingginya angka serapan tenaga kerja, menjadi salah satu alasan mendasar pentingnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi kewilayahan berbasis pada komoditas-komoditas pertanian lokal terlebih pada wilayah-wilayah perdesaan yang memang didominasi oleh kegiatan ekonomi utama pada sektor pertanian.

Dalam domain praktikal langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pemerataan kualitas kesejahteraan masyarakat sebelumnya telah dilaksanakan melalui berbagai konsep atau skema kebijakan pembangunan terpadu yang berbasis kawasan seperti skema Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Pengembangan Ekonomi Lokal yang diinisiasi oleh beberapa Kementerian serta Bappenas. Meskipun pada sisi lain, sebagaimana diuraikan oleh Najiyati, Simanjuntak dan Nurwati (2015), berbagai hasil penelitian justru menunjukkan bahwa program-program tersebut secara umum belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan karena pada implementasinya masih bersifat sektoral, tumpang tindih dan atau kurang koordinasi.

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan satu dari beberapa daerah dengan dominasi struktur ekonomi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Indonesia. Daerah ini merupakan wilayah pemekaran termuda di Provinsi Maluku Utara yang pada Tahun 2003 hingga Tahun 2012 masih merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Pulau Taliabu selanjutnya dibentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

Sektor perekonomian di kabupaten Pulau Taliabu pada 5 tahun terakhir menurut BPS (<https://taliabukab.bps.go.id/>), masih didominasi oleh sektor utama pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi (prosentase) rata-rata antara Tahun 2018 hingga Tahun 2021 sebesar 54,7% dengan tingkat pertumbuhan pada Tahun 2021 sebesar 2,2%, berbanding total PDRB sebesar Rp. 1.663.353.700.000 (PDRB ADK 2010). Peringkat selanjutnya adalah sektor pertambangan sebesar 18,4% (Tahun 2021) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 107,3%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,7% (Tahun 2021) dengan tingkat pertumbuhan 3,1%. Pergeseran dominasi struktur pertanian pada PDRB mulai mengalami penurunan sejak tahun 2018, hal ini disebabkan oleh mulai intensifnya kegiatan produksi pertambangan. Pada tahun 2017, sektor pertanian masih berkontribusi sebesar 64,42% dan sebagai bandingan pada sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 0,18%, sebaliknya pada tahun 2018 kontribusi pertambangan meningkat signifikan hingga mencapai 6,28% dalam kontribusinya pada PDRB. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian masih yang tertinggi dengan

prosentase di atas 50% dari total PDRB di daerah.

Selanjutnya pada kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Taliabu Tahun 2022 berada pada prosentase 2,56%. Sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagaimana dikutip dari publikasi BPS tentang keadaan ketenagakerjaan Maluku Utara (<https://malut.bps.go.id/>), serapan sektor pertanian dari total tenaga kerja yang bekerja di kabupaten Pulau Taliabu yakni sebesar 50,81%.

Kondisi tingkat kemiskinan di kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 dan tahun 2022 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Penduduk Kab. Pulau Taliabu Tahun 2021 dan 2022

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1.	2021	425.241	7,49	0,57	0,10
2.	2022	448.745	6,88	0,83	0,17

Sumber: diolah dari data BPS: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka Tahun 2022

Data di atas menunjukkan masih tingginya prosentase tingkat kemiskinan. Sebagai perbandingan dengan data yang disajikan pada Tabel 1, tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebesar 6,37%, atau lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Komposisi pengeluaran rumah tangga juga dapat dijadikan sebagai gambaran parsial untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah (<https://sirusa.bps.go.id/>). Makin rendah prosentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka makin membaik tingkat kesejahteraan suatu penduduk, demikian pula sebaliknya. Deskripsi mengenai komposisi pengeluaran makanan dan non-makanan dalam perkapita/bulan pada Tahun 2020 di kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Pengeluaran Rumah Tangga Penduduk Kab. Pulau Taliabu Tahun 2022

Tahun	Pengeluaran Makanan (Rp)+(%)*		Pengeluaran Non Makanan (Rp)+(%)*		Golongan Pengeluaran Perkapita/ Bulan (Rp)+(%)**	
					500.000 – 749.999	39,98
2022	504.143	59,42	344.232	40,58	750.000 – 999.999	19,53
					1.000.000 – 1.499.999	19,10

Sumber : diolah dari data BPS: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka Tahun 2020 dan 2022

* : Data Tahun 2022

** : Data Tahun 2020

Pengeluaran penduduk masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Sebaliknya pada golongan pengeluaran per kapita juga masih didominasi oleh penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan pada golongan rendah. Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang masih rendah.

Kecamatan Lede merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, dengan struktur ekonomi yang turut didominasi oleh pengembangan sektor pertanian, utamanya pada sub-sektor perkebunan cengkeh. Kegiatan pertanian cengkeh di Kecamatan Lede melibatkan sebagian besar petani di setiap desa dan telah menjadi sumber pendapatan utama penduduk. Meskipun pada dasarnya giat perkebunan yang dikembangkan juga mencakup sejumlah komoditi tahunan lain seperti kelapa, pala, kakao dan jambu mete, tapi dalam ukuran prosentase pemanfaatan lahan pertanian pada setiap desa serta pelibatan petani rata-rata masih didominasi oleh pengembangan perkebunan cengkeh. Pengembangan lahan-lahan perkebunan cengkeh juga telah memacu angka serapan tenaga kerja di Pulau Taliabu khususnya di Kecamatan Lede.

Pengembangan pertanian cengkeh di Kecamatan Lede adalah perkebunan rakyat (PR) dan tidak melibatkan pihak swasta dalam bentuk perkebunan-perkebunan besar (PBS) seperti pada komoditi perkebunan cengkeh atau sawit di berbagai daerah lain yang turut menggunakan metode-metode dengan penerapan teknologi pada skala kegiatan usaha produksi. Giat pertanian cengkeh di Kecamatan Lede belum tersentuh metode-metode kegiatan dengan penerapan teknologi yang sistematis pada setiap tahapan pengembangan pertanian cengkeh. Tentu jikalau terdapat penerapan teknologi (intensifikasi) dalam kegiatan pertanian akan memberi pengaruh pada *outcome* hasil pertanian. Sejauh yang teramati, peningkatan hasil kegiatan pertanian baru sebatas pada metode-metode konvensional berdasar pengetahuan dan pengalaman petani atau melalui perluasan lahan-lahan (ekstensifikasi) perkebunan cengkeh. Meskipun pada sisi lain, beberapa kawasan perkebunan telah dibatasi oleh kawasan-kawasan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan (IUP), tapi peluang perluasan lahan-lahan perkebunan baru masih cukup tersedia.

Sebaliknya dari yang teramati, dampak kemanfaatan ekonomi cengkeh cenderung

tidak bertahan lama dengan membandingkan giat ekonomi lokal khususnya di wilayah kecamatan Lede antara pada masa panen dan masa pasca panen. Peningkatan aktivitas ekonomi lokal hanya terjadi pada masa panen hingga antara 2-3 bulan pada pasca panen. Demikian halnya kualitas kesejahteraan yang lebih baik rata-rata hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat petani cengkeh terutama oleh petani yang memiliki luasan lahan perkebunan diatas rata-rata petani. Data valid berkaitan dengan deskripsi tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di Kecamatan Lede tidak cukup tersedia, selain yang terpublikasi melalui realis tahunan BPS sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2 di atas. Setidaknya beberapa indikator lain semisal kondisi bangunan tempat tinggal (rumah) yang dimiliki, harta bergerak berupa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, jumlah anak yang menamatkan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi, serta kemampuannya dalam menjangkau pemenuhan kebutuhan kesehatan hingga ke tingkat rujukan di luar daerah merupakan beberapa indikator yang cukup menggambarkan kualitas kesejahteraan ekonomi petani cengkeh.

Sebagaimana diketahui, rangkaian kegiatan pertanian adalah kumulasi sejumlah tahapan dan kegiatan yang melibatkan berbagai faktor dan sektor ekonomi. Keterlibatan pihak lain seperti pemerintah daerah sangat diperlukan, dengan mempertimbangan kapasitas petani yang memiliki sejumlah keterbatasan dan hambatan. Peran pemerintah daerah sangat berarti baik melalui pemberdayaan dan pendampingan, pengawasan bahkan subsidi langsung melalui program-program tertentu. Lebih dari itu, keterlibatan pihak swasta juga memiliki posisi yang sama pentingnya untuk semakin mengoptimalkan kegiatan pertanian cengkeh yang dilakukan dalam makna luas sebagai agribisnis cengkeh. Keterlibatan para pihak dimaksud mesti terkoordinasi dan saling bersinergi serta menjangkau setiap tahapan dalam kegiatan agribisnis mulai dari pra-produksi sampai pada pasca produksi termasuk dalam rangkaian distribusi dan pemasaran serta upaya peningkatan nilai tambah ekonomi. Dengan upaya semacam ini, seyogianya optimalisasi nilai ekonomi cengkeh dapat memberi kontribusi tidak hanya pada *income* rumah tangga petani cengkeh tapi lebih jauh pada sejumlah pihak dan sektor ekonomi lokal lainnya yang saling terkait (*multiplier effect*).

Cengkeh merupakan komoditi perkebunan dengan pangsa pasar domestik yang cukup tersedia juga permintaan pasar ekspor yang tinggi dan belum terpenuhi secara optimal. Sebagaimana yang disampaikan melalui penelitian Nurhayati, Hartoyo dan

Mulatsih (2018), serta Hidayah, Fariyanti dan Anggraeni (2022) yang menyimpulkan tingginya daya saing cengkeh Indonesia di pasar global, serta prospeknya untuk meningkatkan kinerja ekspor pada sektor komoditi pertanian. Cengkeh juga merupakan komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan kumulasi pendapatan bersih yang cukup menjanjikan bagi petani cengkeh (Dilapanga, Rauf dan Boekosoe, 2020). Dengan pangsa pasar yang masih terbuka lebar serta nilai ekonomi cengkeh yang tinggi bagi *income* rumah tangga petani, pengembangan cengkeh sebagai komoditi perkebunan utama memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan untuk terus dikembangkan oleh petani khususnya di wilayah Kecamatan Lede.

Pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan tidak bisa didorong simultan dengan aktivitas pengembangan pada keseluruhan sektor ekonomi yang tersedia karena akan berbenturan dengan keterbatasan sumberdaya dan kemampuan lokal. Perlu ada pilihan-pilihan dalam mendorong optimalisasi sektor ekonomi, dengan menetapkan semisal antara 1 hingga 2 sektor ekonomi dominan atau yang dapat dianggap sebagai sektor ekonomi basis dengan efek pengganda yang lebih luas dan menjangkau ke setiap sektor ekonomi yang tersedia dimana ada keterlibatan individu lain yang bukan petani cengkeh. Pemilihan dan pemilahan seperti ini akan lebih memudahkan dari sisi perencanaan kebijakan terutama oleh pemerintah daerah dalam mendorong dan mengoptimalkan pemanfaatan sektor-sektor ekonomi. Hal ini relevan dengan kesimpulan Sjafrizal (2017), dalam hal struktur perekonomian suatu daerah didominasi oleh kegiatan pertanian maka arah pembangunan juga semestinya disesuaikan dengan struktur perekonomian daerah tersebut. Simpulan yang kurang lebih sama juga diuraikan oleh Tarigan (2018) dengan perlunya menetapkan sektor dan komoditi yang diperkirakan bisa tumbuh cepat di suatu wilayah. Sektor dan komoditi tersebut harus merupakan sektor basis atau memiliki prospek pasar domestik dan ekspor, serta dapat dikembangkan secara besar-besaran atau volume produksinya memenuhi syarat kebutuhan pasar.

Uraian di atas setidaknya merepresentasi sebuah ide mendasar tentang perlunya optimalisasi pemanfaatan komoditi cengkeh sebagai salah satu sektor basis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) untuk mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan mendorong peningkatan serta pamarataan kualitas kesejahteraan penduduk khususnya di Kecamatan Lede dan Kabupaten Pulau Taliabu secara umum.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Angka kemiskinan dengan prosentase tertinggi di perdesaan menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan. Fakta lain menunjukkan bahwa wilayah-wilayah perdesaan merupakan basis pengembangan sektor ekonomi pertanian. Sehingga persoalan kemiskinan, pertanian dan perdesaan setidaknya dapat menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata dengan kualitas yang semakin baik bagi masyarakat.

Beberapa publikasi data yang tersedia mengindikasikan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu, dengan beragam indikator lain yang terkait erat dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebaliknya sektor pertanian salah satunya masih menjadi sektor ekonomi dengan kontribusi tertinggi pada struktur PDRB di Kabupaten Pulau Taliabu. Pada sub-sektor perkebunan, hingga kini cengkeh merupakan komoditi yang paling banyak dikembangkan pada sejumlah kecamatan terutama di wilayah Kecamatan Lede dan telah berkontribusi pada *income* penduduk dan terbukanya lapangan kerja ditingkat lokal sejak beberapa dekade.

Ekonomi lokal tentu harus digerakkan secara inklusif, yang berarti potensi yang tersedia mesti memiliki peranan lebih besar untuk menggerakkan simpul-simpul perekonomian lokal secara lebih luas. Dengan demikian, komoditi cengkeh harus mendapat tempat dalam telaah yang lebih mendalam untuk menakar potensinya sebagai sektor yang memiliki nilai ekonomi optimum dalam mendorong *income* penduduk terutama petani cengkeh. Lebih dari itu, untuk memantapkan posisi cengkeh sebagai sektor ekonomi utama dalam menggerakkan simpul-simpul perekonomian lokal mesti memenuhi sejumlah indikator selain kesinambungan kegiatan produksi dalam jangka panjang. Sehingga pendalaman perlu dilakukan pada sejumlah tahapan dalam kegiatan pertanian cengkeh baik pada skala *on farm* maupun *off farm*, karena sejumlah proses ini akan sangat menentukan potensi ke-ekonomian cengkeh.

Pengembangan potensi ekonomi sektor pertanian dalam domain ekonomi lokal, memerlukan keterlibatan para pihak terutama pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pelaksanaannya. Sehingga analisa lebih mendalam terhadap peran para pihak harus dilakukan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi peran yang sudah dilaksanakan serta sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, sektor swasta dan

petani.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian cengkeh, tentu akan terdapat sejumlah hambatan dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi cengkeh, dilain sisi dimungkinkan hambatan yang sama juga akan ditemukan dalam intensitas implementasi peran pemerintah daerah dan sektor swasta dalam agribisnis cengkeh.

Penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi deskripsi dan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan giat pertanian cengkeh oleh petani di Kecamatan Lede, peran masing-masing pihak dalam rangkaian giat pertanian cengkeh serta hambatan baik dalam kegiatan pertanian cengkeh maupun pada implementasi peran para pihak. Pemahaman yang komprehensif juga diharapkan dapat diperoleh pada bagaimana idealnya pelaksanaan kegiatan pertanian cengkeh serta penempatan peran para pihak tersebut agar memberi kontribusi pada optimalisasi nilai ekonomi komoditi cengkeh dalam mendukung prospek cengkeh sebagai komoditi utama dalam menggerakkan sektor-sektor perekonomian lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek pertanian cengkeh di Kecamatan Lede?
2. Bagaimanakah peran para pihak dalam pertanian cengkeh?
3. Apa hambatan dalam praktek pertanian cengkeh di Kecamatan Lede?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Mendeskripsikan praktek pertanian cengkeh dan potensi ekonominya di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
2. Mendeskripsikan peran para pihak dalam pertanian cengkeh di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
3. Mendeskripsikan hambatan dalam praktek pertanian cengkeh

D. Proposisi

Praktek pertanian cengkeh yang dilaksanakan oleh petani masih bersifat konvensional, dengan intervensi peran yang tepat dari para pihak terkait, ekonomi cengkeh dapat dioptimalkan menjadi sektor basis dalam pengembangan ekonomi lokal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi pengetahuan khusus berkaitan dengan dinamika pertanian cengkeh di Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat berkenaan dengan optimalisasi nilai ekonomi komoditi cengkeh di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

